

Kebijakan Akreditasi Madrasah untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan Islam

Kristiana¹, Juliani², Jihan Fira Azizah³, Mudia Hawa Nur⁴, Pitri Rahmawati⁵

^{1,2,3,4,5} Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Indonesia

Email Corresponding Author: yanakristi8@gmail.com.

ABSTRAK

Proses akreditasi merupakan langkah krusial dalam menjamin mutu pendidikan di madrasah, dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah. Penilaian mencakup delapan standar nasional pendidikan: kualitas lulusan, kurikulum, proses pembelajaran, pemanfaatan sarana dan prasarana, tenaga pengajar, pembiayaan, dan manajemen sekolah. Tujuan utamanya adalah memastikan madrasah memenuhi standar optimal untuk kualitas pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan yang berbasis keagamaan. Madrasah yang memiliki akreditasi yang baik tidak menutup kemungkinan bahwa madrasah itu sudah cukup memenuhi standar akreditasi. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang mengkaji dokumen kebijakan, jurnal ilmiah, dan publikasi resmi terkait dengan kebijakan akreditasi madrasah untuk peningkatan kualitas Islam yang dapat dijadikan rujukan oleh peneliti. Hasil dari penelitian bahwa Kebijakan akreditasi pada madrasah sangat berpengaruh untuk meningkatkan kualitas Islam. Oleh karena itu perlunya kerjasama Antara madrasah atau sekolah dengan pemerintah serta menteri pendidikan yang ada di Indonesia.

Kata Kunci: *Akreditasi, Kualitas Pendidikan Islam, Madrasah.*

ABSTRACT

The accreditation process is a crucial step in ensuring the quality of education in madrasahs (Islamic Schools). It is conducted by the National Accreditation Board for Schools and Madrasahs. The assessment covers eight national education standards: graduate quality, curriculum, learning process, utilization of facilities and infrastructure, teaching staff, financing, and school management. The primary objective is to ensure that madrasahs meet optimal standards for educational quality, both in general and religious-based education. A madrasah with good accreditation standards. The method used was a literature study with a descriptor qualitative approach, which examined policy documents, scientific journals, and official publications related to madrasah accreditation policies for improving the quality of Islamic education, which can be used as references by researchers. The study found that

accreditation policies in madrasas significantly influence the improvement of Islamic education. Therefore, collaboration between madrasas or schools and the government and the Ministry of Education in Indonesia is necessary.

Keywords: Accreditation, Quality of Islamic Education, Madrasah.

PENDAHULUAN

Pada era reformasi sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia, mekanisme akreditasi menjadi salah satu instrumen strategis untuk meningkatkan mutu lembaga Pendidikan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa akreditasi tidak hanya menjadi simbol status, tetapi juga berpotensi mendorong peningkatan kinerja lembaga apabila diimbangi dengan pengelolaan yang tepat. Dalam konteks madrasah, pengaruh kepemimpinan kepala madrasah terhadap mutu lembaga juga telah diteliti, seperti gaya kepemimpinan partisipatif yang meningkatkan komitmen dan mutu madrasah itu sendiri.

Akreditasi merupakan instrumen vital dalam sistem penjaminan mutu pendidikan nasional. Landasan hukum dari kebijakan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menetapkan delapan standar pendidikan meliputi kompetensi lulusan, isi, proses, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta penilaian Pendidikan. Proses akreditasi menjadi upaya evaluatif dan reflektif untuk menilai apakah suatu lembaga Pendidikan baik formal maupun nonformal telah memenuhi kriteria kelayakan yang ditetapkan Negara. Terkhusus untuk madrasah yang memiliki peran penting dalam membangun budaya dan peradaban, serta mengembangkan aspek intelektual, spiritual, sosial, dan keterampilan siswa. (Kebijakan et al., 2025)

Kebijakan berarti seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing suatu organisasi. Kebijakan (*policy*), menunjukkan adanya serangkaian alternatif yang dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, sedangkan kebijaksanaan (*wisdom*), berkenaan dengan satu keputusan yang cenderung memperbolehkan sesuatu yang 27 sebenarnya dilarang, atau sebaliknya, karena alasan-alasan tertentu, seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan darurat yang sebenarnya. (Salas & Murtadho, 2023) Kebijakan akreditasi dimaksudkan bukan sekadar sebagai bentuk legalitas administratif, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas publik dan mekanisme penguatan kelembagaan. Dalam praktiknya, akreditasi menjadi salah satu pilar reformasi pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan secara transparan, adil, dan komprehensif.

Madrasah memiliki peran strategis dalam mencetak generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Akreditasi menjadi indikator penting yang menilai kelayakan madrasah dalam berbagai aspek, salah satunya peningkatan kualitas

Islam itu sendiri. (Mendidik & Artikel, 2025) Peneliti berpendapat bahwa seseorang yang memiliki kualitas Islam yang baik, maka tidak menutup kemungkinan bahwa madrasah tempat ia menuntut ilmu juga termasuk madrasah yang terakreditasi, dan baik di pandangan masyarakat. Selain itu, akreditasi juga merupakan sebuah apresiasi atas perkembangan yang baik pada madrasah tersebut dan layak untuk di apresiasi. Di Indonesia sendiri Akreditasi ini memiliki jangka waktu dan itu bertahan selama 5 tahun setelah ditetapkan akreditasi tersebut. Secara keseluruhan, akreditasi telah menjadi bagian integral dari proses transformasi pendidikan tinggi di Indonesia. Melalui perbaikan berkelanjutan dan sistem evaluasi yang terstruktur, akreditasi turut mengarahkan lembaga pendidikan tinggi untuk lebih responsif terhadap perubahan zaman, kebutuhan dunia kerja, dan tuntutan globalisasi. (Irma, 2025)

METODE

Penelitian ini memiliki kebaruan yang signifikan dalam menyajikan pendekatan baru terhadap akreditasi pendidikan di Indonesia, dengan memfokuskan pada dampak nyata akreditasi terhadap kualitas pembelajaran dan pengalaman belajar siswa. Penelitian ini mengusulkan untuk menilai akreditasi tidak hanya berdasarkan pencapaian administratif, tetapi juga berdasarkan seberapa besar akreditasi berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan yang relevan dan substansial. Kontribusi baru ini penting, mengingat masih banyak lembaga pendidikan yang berhasil memperoleh status akreditasi yang baik namun belum memperlihatkan perubahan signifikan dalam pengembangan kualitas pendidikan (Yulianti & Qomariyah, 2024).

Metode yang digunakan dalam pembahasan artikel ini, adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang diperoleh dari studi literatur (Assingkily, 2021). Penelitian kualitatif sangat kaya dan sarat dengan deskripsi, sehingga peneliti dalam memahami suatu fenomena secara menyeluruh tentunya harus memahami segenap konteks dan melakukan analisis yang holistik dan perlu dideskripsikan. Laporan penelitian kualitatif biasanya juga berisi sintesis dan abstraksi kesimpulan-kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Konsep Sekolah dan Madrasah

Sekolah/Madrasah merupakan wadah terselenggaranya sebuah pendidikan guna menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 31. Pengertian sekolah menurut KBBI adalah sebuah lembaga atau bangunan yang dipakai untuk aktivitas belajar dan mengajar sesuai dengan jenjang pendidikannya (SD, SLTP, SLTA). Sekolah merupakan lembaga yang digunakan untuk kegiatan belajar bagi para pendidik serta menjadi tempat

memberi dan juga menerima pelajaran yang sesuai dengan bidangnya. Sedangkan madrasah merupakan sekolah yang berada dibawah naungan Kementerian Agama.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1975 037/U/1975 dan No. 36 tahun 1975 pada tanggal 24 Maret 1975 beserta Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1974 pada sidang kabinet terbatas tertanggal 26 Novembar 1974, adapun substansi dari SKB tersebut adalah; Pertama, ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang sederajat; Kedua, lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat lebih atas; dan Ketiga, siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat. Dengan adanya surat keputusan bersama antara menteri tersebut maka status madrasah disamakan dengan sekolah. Secara garis besar yang membedakan sekolah dengan madrasah adalah pada kementerian yang menaungi masing-masing lembaga tersebut (Astuti & Diantoro, 2021).

Konsep Akreditasi Sekolah/Madrasah Sebagai Kebijakan Pendidikan

Akreditasi sekolah/madrasah merupakan kegiatan yang penting dalam dunia pendidikan, hal tersebut dikarenakan kegiatan akreditasi mempunyai fungsi dan manfaat yang besar bagi kelangsungan pendidikan. fungsi pendidikan dibedakan menjadi 3, yaitu:

- a. fungsi pengetahuan: fungsi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sekolah telah melaksanakan standar-standar yang ditetapkan dalam bidang pendidikan dan bagi sekolah akan memperoleh pengetahuan tentang kelemahan dan kekurangan kinerjanya selama 4 tahun terakhir;
- b. fungsi akuntabilitas: tujuannya agar sekolah dapat mempertanggungjawabkan terkait pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna; dan
- c. peningkatan kualitas: tujuannya agar sekolah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil akreditasi.

Program Akreditasi Sekolah sebagai Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan

Akreditasi dimaknai sebagai suatu proses untuk memberikan penilaian terhadap kualitas menggunakan kriteria mutu yang sudah ditetapkan. Akreditasi dapat diartikan sebagai suatu proses, yang meliputi penilaian profesional untuk mengevaluasi bahwa suatu lembaga pendidikan tersebut memenuhi standar yang sudah ditentukan atau tidak. Proses dari akreditasi yaitu dilakukan dengan cara objektif mengenai kelayakan dan kinerja sekolah. Sekolah dapat memberikan informasi yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Sekolah juga dapat berupaya meningkatkan mutu dengan melihat dari evaluasi kegiatan dan akreditasi dilakukan untuk sekolah yang sudah sesuai dengan kesiapan. Adanya akreditasi dapat memetakan mutu pendidikan berdasarkan Standar Nasional

Pendidikan serta menjadi acuan dalam upaya peningkatan mutu dan rencana pengembangan sekolah.

Akreditasi sebenarnya tanggung jawab dari lembaga pemerintahan, karena akreditasi bisa sebagai bentuk perlindungan konsumen. Oleh karena itu pemerintah telah menetapkan Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah yang berguna sebagai evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dalam satuan pendidikan dasar yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Bentuk adanya akreditasi sekolah yaitu diartikan sebagai proses pengakuan kualifikasi lembaga pendidikan melalui pengukuran dan penilaian kinerja sekolah dengan mengajukan perangkat yang telah ditetapkan. Melalui proses akreditasi sekolah juga harus didukung oleh pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat. Sekolah yang mampu mengembangkan program-program akreditasi tentunya tidak lepas dari sebuah perencanaan. (Azizah & Witri, 2021)

Karena pada kenyataannya dalam melakukan akreditasi sekolah tidak berjalan dengan mudah karena banyak permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang sering terjadi seperti persiapan yang kurang, bukti fisik yang belum cukup, panduan belum lengkap, dan lainnya. Selain itu sekolah tidak memiliki waktu untuk melakukan evaluasi diri serta kurangnya koordinasi dan komunikasi antar individu maupun tim. Peningkatan akreditasi sekolah sangat penting dilakukan dari tahun ke tahun. Pihak Sekolah mempersiapkan dengan baik semua hal yang diperlukan dalam akreditasi sekolah, mulai dari tahap perencanaan, persiapan sampai dengan pelaksanaan akreditasi sekolah. Dengan adanya akreditasi setiap program-program sekolah bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan.

Pembahasan

Tingkat Pencapaian Standar Akreditasi

Instansi pendidikan yang berhasil memperoleh hasil akreditasi yang baik, dampak positif terhadap kualitas pembelajaran tidak sepenuhnya terwujud dalam praktik sehari-hari. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara proses akreditasi yang lebih berfokus pada pemenuhan standar administratif dengan peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran yang sesungguhnya. Meskipun demikian, beberapa elemen yang terkait dengan infrastruktur dan pengelolaan madrasah mengalami perbaikan signifikan setelah proses akreditasi. Temuan ini memberikan wawasan baru mengenai bagaimana akreditasi dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat untuk penilaian administratif, tetapi juga sebagai instrumen yang berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan jika diterapkan secara lebih terintegrasi dengan praktik pembelajaran. perlunya evaluasi yang lebih mendalam untuk memastikan bahwa pencapaian tersebut berdampak positif langsung pada kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, meskipun standar akreditasi telah tercapai, hasil yang diperoleh belum sepenuhnya mencerminkan perubahan nyata dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa.

Pendidikan Islam

Lembaga pendidikan Islam (LPI) mempunyai keunikan tersendiri yang membedakannya dari lembaga pendidikan umum, terutama dalam hal kurikulum yang menekankan integrasi ilmu agama dan umum. Kurikulum di lembaga pendidikan Islam mencakup mata pelajaran keagamaan seperti tafsir, fikih, akidah, serta pembelajaran Al-Qur'an dan Hadits yang dijadikan sebagai inti pengajaran. Selain itu, nilai-nilai Islam seperti akhlak, adab, dan spiritualitas sangat diutamakan dalam keseharian, sehingga menciptakan suasana pembelajaran yang lebih komprehensif, mengintegrasikan ilmu duniawi dan ukhrawi. Nilai-nilai Islam dapat mendukung kualitas Islam itu sendiri. Nilai amanah (kepercayaan) misalnya, mengajarkan setiap pihak dalam pendidikan untuk bertanggung jawab terhadap mutu pendidikan, baik dalam pengelolaan maupun proses pembelajaran. Prinsip ihsan (kualitas terbaik) menuntut agar setiap tindakan dalam pendidikan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, prinsip adil (keadilan) menekankan pentingnya distribusi yang merata dalam layanan pendidikan, evaluasi, dan kesempatan belajar bagi semua pihak tanpa diskriminasi. Ketiga nilai tersebut menjadi dasar yang kuat untuk memastikan bahwa penjaminan mutu bukan hanya memenuhi standar formal, namun juga sejalan dengan ajaran moral dan spiritual agama Islam (Adzhar & Yasin, 2025).

Dampak Akreditasi pada Madrasah

Hasil akreditasi memberikan dampak yang signifikan terhadap madrasah itu sendiri, baik dari segi pendidik, peserta didik maupun sarana prasarana serta manajemen madrasah atau sekolah tersebut. Predikat akreditasi yang diperoleh sekolah mendorong kepala sekolah dan staf pengajar untuk terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan yang diberikan. Program pelatihan guru, pengembangan kurikulum, serta peningkatan fasilitas pendidikan menjadi prioritas utama. Namun, salah satu tantangan yang muncul adalah tekanan administratif yang besar dalam memenuhi dokumen dan standar yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi. Meskipun pengelolaan akreditasi sangat penting, sering kali hal ini mengalihkan fokus guru dari tugas utama mereka, yaitu berinteraksi langsung dengan siswa. Tekanan administratif yang berkelanjutan dapat mengurangi waktu yang seharusnya digunakan untuk pengajaran yang lebih personal, yang sejatinya lebih berdampak langsung terhadap perkembangan akademik dan karakter siswa (Studi et al., 2024).

Peningkatan kualitas pembelajaran setelah akreditasi lebih banyak dirasakan dalam hal perbaikan sarana dan prasarana, namun belum diimbangi dengan pembaruan yang signifikan dalam metode pengajaran yang diterapkan di kelas. Akreditasi, dalam konteks ini, tampaknya lebih berfokus pada evaluasi administratif dan bukan pada pengembangan pedagogis yang lebih mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akreditasi dapat mendorong perbaikan pada

struktur dan pengelolaan, pengaruhnya terhadap kualitas pembelajaran memerlukan waktu yang lebih panjang dan keterlibatan lebih aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, temuan ini menyoroti perlunya evaluasi yang lebih holistik terkait dampak akreditasi terhadap kualitas pengajaran, yang tidak hanya mengukur hasil administratif tetapi juga hasil pembelajaran yang nyata di kelas.

Dalam konteks akreditasi, hal ini termanifestasi sebagai fokus berlebihan pada pemenuhan indikator administratif daripada pencapaian tujuan inti peningkatan mutu pendidikan dan relevansi lulusan. Fenomena ini diperparah oleh sistem insentif yang lebih menekankan reward terhadap pencapaian status akreditasi daripada improvement yang terukur. (Syahbani et al., 2025) terkait dengan hal tersebut, maka pentingnya penguatan keimanan dan pemahaman tentang islam, karena di dalam islam itu sendiri banyak hal yang dipelajari, baik dari untuk sesama manusia maupun makhluk lainnya, serta pentingnya keikhlasan seorang guru dalam mendidik.

SIMPULAN

Dari isi penelitian diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa kebijakan akreditasi pada madrasah untuk peningkatan kualitas islam itu sangat berkaitan satu sama lain, dimana madrasah yang berkembang dan mampu menjadikan madrasah yang penuh dengan nilai-nilai islam maka untuk mencapai akreditasi madrasah atau sekolah hanya perlu mengupgrade hal-hal yang berkaitan dengan konsep pembelajaran, manajemen madrasah, sarana dan prasarana madrasah, serta tempat pembelajaran yang bersih dan rapi, mempunyai visi misi yang seimbang, dan saling bekerja sama antara pihak sekolah maupun masyarakat.

Kemudian untuk dampak dari akreditasi itu sendiri ialah (a) Peningkatan mutu pendidikan: karena akreditasi mendorong madrasah untuk memenuhi dan meningkatkan standar nasional pendidikan, seperti kurikulum, proses pembelajaran, penilaian serta kompetensi kelulusan. (b) Profesionalisme guru dan tenaga kependidikan : karena dalam proses akreditasi, kualifikasi dan kompetensi guru menjadi perhatian utama. (c) Perbaikan manajemen dan tata kelola madrasah : karena akreditasi menuntut administrasi yang tertib, perencanaan yang jelas, serta pengelolaan madrasah yang transparan. (d) Meningkatkan kepercayaan masyarakat : karena status dan peringkat akreditasi menjadi tolak ukur kualitas madrasah dimata masyarakat. Madrasah yang terakreditasi A atau B cenderung lebih dipercaya oleh orang tua untuk menyekolahkan anak nya di sekolah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzhar, M. H., & Yasin, M. (2025). *Upaya Strategis Peningkatan Mutu Pendidikan Berkelanjutan Melalui Quality Assurance di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Kediri*. 783–798.
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Astuti, P. Y., & Diantoro, F. (2021). *Evaluasi sekolah dan madrasah melalui sistem akreditasi dalam kebijakan pendidikan di indonesia*. 6(2). <https://doi.org/10.22515/attarbawi.v6i2.4282>
- Azizah, L., & Witri, S. (2021). *Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Penerapan Total Quality Management dalam Program Akreditasi Sekolah*. 1(1), 69–78. <https://doi.org/10.35878/guru.v1i1.263>
- Irma, D. (2025). *Peran Akreditasi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Tinggi : Kajian Kebijakan di Indonesia*. 513–520.
- Kebijakan, T., Rekomendasi, D. A. N., Alamanda, F., & Syaifudin, M. (2025). *AKREDITASI SEBAGAI INSTRUMEN PEMBANGUNAN MUTU MADRASAH (TELAAH KEBIJAKAN DAN REKOMENDASI STRATEGIS) Frisca Alamanda 1 , Muhammad Syaifudin 2 , Asmuri 3*. 20(2), 2086–2097.
- Mendidik, S., & Artikel, I. (2025). *Serumpun Mendidik Volume 02 Nomor 1, Januari 2025*. 02, 39–45.
- Salas, M. K., & Murtadho, M. I. (2023). *Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Peningkatan Mutu dan Standarisasi (Akreditasi) Pendidikan Islam Di Indonesia*. 1(1), 26–33.
- Studi, P., Di, K., & Tahfidz, M. A. (2024). *Evaluasi Dan Akreditasi Sekolah Sebagai Indikator Mutu*. 4(1), 1427–1436.
- Syahbani, N., Latif, M., & Taridi, M. (2025). *Evaluasi Akreditasi Madrasah Aliyah Kota Jambi dengan Model CIPP : Analisis Efektivitas terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan*. 4751–4763.
- Yulianti, Y., & Qomariyah, S. (2024). *Peran Akreditasi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan : Studi Kasus di MTs Al-Idris*. 1.